



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

A

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 13 Desember 2016 No. 99

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Dr.YUDHA MUNAJAT SAPUTRA, M.Ed.
2. Jabatan : KEPALA DINAS - OLARHAGA DAN PEMUDA
3. Alamat Kantor : Jl. DR. RAJIMAN NO. 6A, BANDUNG
4. Tanggal Pelaporan : 26 Mei 2015

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK Rp. 241.052.000
(TANAH DAN BANGUNAN)

1. Tanah & Bangunan seluas 126 m2 & 200 m2, di Kabupaten BANDUNG BARAT, yang berasal dari HASIL SENDIRI , perolehan dari tahun 1992 sampai dengan 2008 NJOP Rp.241.052.000

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI Rp. 0
DAN MESIN LAINNYA

b. PETERNAKAN, Rp. 0
PERIKANAN,
PERKEBUNAN,
PERTANIAN,
KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN
USAHA LAINNYA

c. HARTA BERGERAK Rp. 16.795.000
LAINNYA

1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1997 sampai dengan 2015 dengan nilai jual Rp.16.795.000

C. SURAT BERTAGAS Rp.	0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA Rp.	1.894.514.474
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.1.894.514.474		
E. PIUTANG Rp.	0
TOTAL HARTA (II) Rp.	2.152.361.474
III. HUTANG Rp.	0
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III) Rp.	2.152.361.474

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

Berita Negara Republik Indonesia
Tanggal 13 Desember 2020 (No.28)

